

BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang didasarkan pada jawaban akhir penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu saran akan diberikan pada sub bab ini sebagai akhir dari penelitian ini.

6.1 Kesimpulan

Collaborative governance dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi dianalisis menggunakan pisau analisis dari Ansell dan Gash (2007) melalui empat dimensi, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Dimensi pertama dalam kolaboratif ialah kondisi awal, menunjukkan jika ada ketidakseimbangan sumberdaya antar *stakeholders*, namun terdapat insentif untuk berpartisipasi antar *stakeholders* walaupun belum maksimal dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program kolaborasi. Selanjutnya, sejarah konflik atau kerjasama, pada indikator ini menjadi ketakutan tersendiri karena terjadinya konflik antar *stakeholders* bisa menjadi penghambat ataupun pendorong dalam kolaborasi ini dan rasa kemanusiaan merupakan hal yang mendorong terjadinya kolaborasi

Dimensi kedua dalam kolaboratif ini ialah kepemimpinan fasilitatif dimana pada dimensi ini kepemimpinan sangat penting karena dapat mempengaruhi kolaboratif yang terjadi. Pada penelitian yang dilakukan ditemukan hal yang menarik, dimana menunjukkan jika sudah terdapat upaya pemimpin untuk memperluas partisipasi namun tidak sejalan dengan luasnya pengaruh dalam kolaborasi yang dilakukan. Selanjutnya, dimensi ketiga dalam kolaboratif ini ialah desain kelembagaan, dimana desain kelembagaan ini merujuk kepada aturan dalam program kolaboratif ini, dalam *collaborative governance* penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi ini mengacu kepada PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 2

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir dan juga *collaborative governance* yang mengatur mengenai peran masing-masing *stakeholders*, namun belum adanya nota kesepahaman antar *stakeholders* yang terlibat yang menjelaskan lebih rinci terkait program kolaborasi ini, nota kesepahaman hanya ada antara pemerintah dan pihak swasta saja tanpa melibatkan masyarakat. Selanjutnya transparansi terhadap program belum ada, karena masyarakat umum belum diberikan ruang secara luas untuk berpartisipasi. Dimensi yang terakhir ialah dimensi proses kolaboratif yang menunjukkan jika forum belum rutin dilakukan hanya dilakukan disaat-saat tertentu saja. Lalu hasil sementara dari kolaboratif penanggulangan bencana ini ialah adanya progres dalam program ini.

6.2 Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perlu melakukan sosialisasi terkait dengan program kolaboratif yang dilakukan secara inklusif kepada masyarakat agar memiliki persepsi yang sama mengenai kolaborasi dalam penanggulangan banjir ini;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perlu untuk membuat nota kesepahaman terkait dengan program kolaborasi agar para *stakeholders* merasa ikut bertanggungjawab dan mengetahui perannya masing-masing secara rinci pada kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini.
3. Pemerintah Daerah kabupaten Bekasi perlu memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kolaborasi pada penanggulangan bencana banjir ini karena peningkatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan rasa saling percaya dan komitmen untuk bertanggungjawab secara bersama.
4. Pemerintah perlu melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam program pembangunan Destana/Katana.